

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilaksanakan dengan baik, tetapi dilihat dari segi, pangkat, jabatan, latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengembangan, penerapan ilmunya serta tanggung jawab pegawai pada bidang pengawasan dan pengendalian belum sesuai dengan tugas dan fungsi pokok bidang tersebut. Dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki para pegawai seperti ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum masih terlalu sedikit dibandingkan dengan yang hanya berpendidikan SMA serta belum banyak mendapatkan pelatihan dan pengembangan mengenai tugas yang ditempatkan.
2. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat setiap tahunnya, dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) anggaran dan realisasi dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Tetapi jika dilihat dari masing-masing komponen pada PAD terdapat selisih kurang antara anggaran dan realisasi yaitu pada komponen retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 2 (dua) komponen tersebut mengalami fluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Berdasarkan analisis dan uraian perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya pada bidang

pengawasan dan pengendalian berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dilihat dari hasil analisis yaitu dari ketiga variabel yakni variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan, dan pengendalian maka hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan kategori PAD dalam kategori sangat baik (88,93%), variabel pengawasan secara keseluruhan dalam kategori baik (76,91%) serta variabel pengendalian secara keseluruhan dalam kategori baik (81,51%)

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan :

1. Bagi pemerintah daerah, pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian diharapkan lebih memperhatikan pegawai yang akan ditempatkan pada bidang tersebut yaitu pada masa yang akan datang lebih merekrut pegawai yang berkualitas, pegawai yang memenuhi syarat dengan tugas dan fungsi dari bidang yang akan ditempatkan dan pegawai yang ada lebih ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai pelatihan dan pengembangan mengenai tugas yang ditempatkan.
2. Berdasarkan penelitian mengenai pengawasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kinerja pegawai pada bidang pengawasan dan pengendalian belum begitu maksimal sehingga perlu dimaksimalkan lagi,

karena dilihat dari latar belakang pendidikan harus memiliki latar belakang ilmu yang sesuai untuk tugas dan fungsi pada bidang yang ditempati.

3. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah harus lebih memeriksa penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki.2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 1. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Baswir, Revrison. 2002. Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta : BPFE
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2014. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ke Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Hansen, Don R dan Mowen, Maryanne. 2000. Manajemen Biaya Buku satu: Akuntansi dan Pengendalian. Jakarta : Salemba Empat.
- Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lumbantobing, Josua. 2012. Analisis Kualitas Pengawas Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi : Minahasa
- Manulang. 1994. Pedoman Praktis Pengambilan Keputusan. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Mariani, Purwanti. 2012. Peran pengawasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama: Bandung.
- Olson, L. 2003. *Development of A Questionnaire Measuring Personal Responsibility* : Universitas of Holl.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmat, Sentot. 2010. Analisis Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Jakarta.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Saleh, Marzuki. 2007. Strategi dan Model Pelatihan. Malang : IKIP Malang
- Santoso, P. Budi, 2005, Analisis Statistik, Edisi Pertama, Pt. Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2004. Statistik untuk penelitian setakan keenam. Bandung : Alfabeta
- Sunyoti, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung : PT Revika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah